

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu pendukung perkembangan perekonomian Indonesia, terutama untuk kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah serta sektor informal. Peran BPR dalam pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ini dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan pemerataan kesempatan berusaha di Indonesia (PA-BPR, 2010:V).

Sebagai bank, BPR sesuai dengan Undang- Undang Perbankan yang diatur dalam UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/1998. BPR merupakan bank yang memiliki kegiatan usaha terbatas dengan transaksi yang sederhana, meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito serta penyaluran kredit. Keterbatasan ini diberikan kepada BPR terkait dengan tujuan pelayanan utama BPR kepada usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat sekitar.

Sebagai entitas yang mempunyai tanggung jawab publik karena menghimpun dana dari masyarakat, BPR membutuhkan sarana pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Laporan keuangan merupakan salah satu sarannya. Oleh karena itu BPR dituntut untuk menyajikan laporan keuangan berkualitas, yang merupakan salah satu sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas aktivitas yang telah dilakukannya dalam kurun waktu tertentu. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan

informasi yang akurat dan komprehensif bagi seluruh pihak yang berkepentingan dan mencerminkan kinerja BPR secara utuh (PA-BPR, 2010:iii).

Menurut Mardiasmo (2000:27) laporan keuangan pada dasarnya dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan mengenai suatu perusahaan yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukannya, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut PA BPR (2010:11) tujuan laporan keuangan yaitu untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan hasil usaha yang dicapai oleh suatu perusahaan. Laporan keuangan juga dapat menjadi tolak ukur bagi pemilik dalam memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai, dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki. Setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya didasarkan pada laba semata.

Berdasarkan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009 perihal Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat yaitu: Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan

berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi BPR. Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi BPR selama ini adalah PSAK 31 tentang Akuntansi Perbankan (PSAK 31) yang berlaku bagi seluruh perbankan. Dengan diberlakukannya PSAK 50 Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (PSAK 50) dan PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran (PSAK 55), yang menggantikan PSAK 31, maka standar akuntansi bagi perbankan mengacu pada PSAK yang berlaku. Penerapan PSAK 50 dan PSAK 55 bagi BPR dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan memerlukan biaya yang besar dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh maka BPR memerlukan standar akuntansi keuangan yang sesuai. Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) selain mengeluarkan PSAK 50 dan PSAK 55 juga menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). DSAK-IAI dalam SAK ETAP menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud. Berdasarkan hal tersebut di atas, standar akuntansi keuangan bagi BPR menggunakan SAK ETAP (www.bi.go.id).

Saat ini standar akuntansi keuangan sedang dalam proses konvergensi dengan IFRS, sehingga penyusunan laporan keuangan menjadi lebih kompleks dan banyak menggunakan *fair value* dan *professional judgment*. Kondisi demikian cukup menyulitkan bagi sebagian besar perusahaan di Indonesia, terutama bagi perusahaan mikro, kecil, dan menengah. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas yang tidak mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan. Namun, regulator

dapat menetapkan entitas yang mempunyai akuntabilitas publik yang signifikan untuk menggunakan SAK ETAP (PA-BPR, 2010:V). Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang disahkan oleh DSAK – IAI pada tanggal 19 Mei 2009. Munculnya SAK ETAP dengan maksud agar konvergensi IFRS dapat segera diwujudkan penuh sehingga perusahaan-perusahaan yang kesulitan untuk menerapkan SAK penuh, dapat mengadopsi SAK-ETAP sebagai standar keuangan yang lebih sederhana.

BPR merupakan kegiatan yang terbatas dan sederhana yang dipandang tidak memadai dari sisi biaya dan manfaat jika menggunakan standar akuntansi keuangan umum yang digunakan bagi bank umum. Untuk itu, bagi BPR ditetapkan penggunaan standar akuntansi keuangan yang sederhana yaitu Standar Akuntansi Keuangan bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Hal tersebut sesuai dengan SE BI No.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009, yang didalamnya memuat bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud. Sehingga standar akuntansi keuangan bagi BPR menggunakan SAK ETAP. Penggunaan SAK ETAP sebagai standar akuntansi keuangan bagi BPR bertujuan untuk mempermudah BPR dalam menerapkan standar akuntansinya namun tetap memperhatikan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional yang berlaku yang perlu didukung dengan Pedoman Akuntansi BPR sebagai petunjuk yang sifatnya lebih teknis, dimana dalam PA-BPR tersebut memuat penjelasan dan contoh-contoh perhitungan yang diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap SAK ETAP bagi BPR.

Berdasarkan SE No. 12/ 14 /DKBU tanggal 1 Juni 2010 Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat yaitu: Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BPR, pedoman akuntansi bagi BPR dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi BPR dan Pedoman Akuntansi BPR (PA-BPR) merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari SAK ETAP. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPR wajib berpedoman pada PA-BPR.

Pedoman Akuntansi BPR merupakan penjabaran lebih lanjut prinsip dan substansi pengaturan dalam SAK ETAP untuk membantu BPR dalam menyusun laporan keuangan. PA BPR bertujuan untuk memberikan acuan minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dalam menyusun laporan keuangannya. Disamping itu, PA BPR juga bertujuan untuk menciptakan keseragaman perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi unik pada BPR dalam penyusunan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di antara BPR, terutama daya bandingnya. Proses penyusunan Pedoman Akuntansi BPR yang melibatkan regulator, akuntan, dan praktisi telah melalui proses yang lazim dalam penyusunan suatu pedoman akuntansi (*due process procedure*), termasuk public hearing dan limited hearing. Untuk itu, bagi BPR ditetapkan penggunaan standar akuntansi keuangan yang sederhana yaitu Standar Akuntansi Keuangan

bagi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) yang telah diberlakukan bagi BPR sejak 1 Januari 2010 (Waluyo, dkk:2011).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Auliyah (2012), secara garis besar bahwa pada pengusaha kampung batik Sidoarjo telah menerapkan akuntansi sederhana dalam kegiatan usahanya. Namun laporan keuangan yang mereka buat belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal tersebut karena mayoritas pengusaha UKM belum mengetahui adanya SAK ETAP. Pengenalan dan pelatihan tentang akuntansi dan SAK ETAP dapat menjadi wadah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Tituk (2011), yaitu adanya pengaruh positif antara tingkat pendidikan pemilik, pemahaman teknologi informasi, karakteristik kualitatif laporan keuangan terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)” sebagian teruji kebenarannya, karena hanya variabel pemahaman teknologi informasi yang berpengaruh terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sedangkan variabel tingkat pendidikan pemilik dan karakteristik kualitatif laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Waluyo et, al. (2011): bahwa dalam perlakuan akuntansi penyajian laporan keuangan harus terdapat unsur-unsur identifikasi, *measurement*, *recognition*, *valuation* dan presentasi agar sebuah laporan keuangan memberikan informasi yang relevan

bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing BPR. Karakteristik kualitatif laporan keuangan meliputi; *understandability*, realibilitas, keterbandingan dan relevansi. Dengan adanya SAK ETAP diharapkan menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sehingga meningkatkan daya banding di antara laporan keuangan BPR.

Penelitian tentang SAK ETAP lebih banyak pada penerapannya yang dilakukan oleh UMKM. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi SAK ETAP pada BPR yang berjudul, “Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) Pada Bank Perkreditan Rakyat (Studi Kasus BPR Bakti Artha Sejahtera Sampang)”

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada BPR?
2. Bagaimana dampak implementasi SAK ETAP pada penyusunan dan pelaporan keuangan BPR?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi SAK ETAP pada BPR?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah diidentifikasi diatas, maka penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui implementasi Standar Akuntan Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) pada BPR.
2. Untuk mengetahui dampak implementasi SAK ETAP pada penyusunan dan pelaporan keuangan BPR.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi SAK ETAP pada BPR.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)

2. Bagi BPR

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada BPR dalam rangka mewujudkan perubahan organisasi dengan meningkatkan kinerja pegawai sebagai upaya mencapai visi dan misi BPR.